

**ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, PDRB, IPM, DAN INFLASI
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Oleh

Nama : Nova

NIM : 19313295

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, PDRB, IPM, DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Nova

NIM : 19313295

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiarisasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Februari 2023



Nova

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, IPM, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Nama : Nova
Nomor Mahasiswa : 19313295
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing



Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDEc

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, IPM, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

Disusun oleh : NOVA

Nomor Mahasiswa : 19313295

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 14 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc.


.....

Penguji : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.


.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
YOGYAKARTA



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kehendak-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, PDRB. IPM, DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH”**. Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat Program Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, ayah Ardiyansyah dan mama Suhairy yang selalu mendoakan, mendukung dan memberi nasehat serta sabar dalam memberikan tenaga, materi, dan waktu untuk penulis.
2. Kepada saudara kandung tercinta, Hovita, Retti, dan Muhammad Faisal, terima kasih selalu telah menghibur dan menyemangati penulis.
3. Kepada kedua keponakan tercinta Dhirgam Pranaja Bumi dan Zea Aurora Haflanie, terima kasih selalu menghibur dan menyemangati penulis.
4. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E, MIDEc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan bantuan, ilmu dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staff pengajar Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis Ekonomika UII, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat seperjuangan yang penulis sayangi, Nor Hidayanti, Regita Yekti Kinanti, Aendha Ayassyh, dan Ngaqilatul Munawaroh. Terima kasih selalu

menjadi pendengar yang baik serta memberikan dukungan penulis dalam penulisan skripsi

7. Teman-teman penulis, Dimas Bayu, Annas Nur Hidayat, terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.
8. Teman dekat penulis, Tia, Irna, dan Aidha, yang selalu memberikan banyak motivasi dalam proses penulisan skripsi.
9. Teman-teman Ilmu Ekonomi FBE UII Angkatan 2019 dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam segala hal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah kerja keras selama ini dan tidak pernah menyerah, Nova kamu keren.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga semua pihak yang sudah membantu selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dalam lindungan Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bisa digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil dari analisis pengaruh pengangguran, PDRB, IPM, dan Inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2021. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode data panel dinamis yang diolah dengan bantuan aplikasi Eviews 12. Estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *first-difference Generalized Method of Moment* (FD-GMM) dengan hasil penelitian variabel pengangguran, variabel IPM, dan Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan variabel PDRB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : *Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, inflasi dan kemiskinan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Kemiskinan	15
2.2.2 Jenis-jenis Kemiskinan.....	16
2.2.3 Pengangguran	17
2.2.4 Jenis-jenis Pengangguran	17
2.2.5 PDRB.....	18
2.2.6 Jenis-Jenis PDRB	19
2.2.7 IPM.....	19
2.2.8 Manfaat IPM.....	20
2.2.9 Inflasi.....	20

2.2.10	Jenis-jenis Inflasi.....	21
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	22
2.4	Hipotesis Penelitian	22
BAB 3.....	24
METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1	Metode Pengumpulan Data.....	24
3.2	Definisi Operasional Variabel.....	24
3.2.1	Variabel Dependen	24
3.2.2	Variabel Independen.....	24
3.3	Metode Analisis Data	25
3.4	Data Panel Dinamis.....	25
3.6	first-difference Generalized Method of Moment (FD-GMM)	26
3.7	Estimasi Model data panel System Generalized Method of Moments.....	27
3.8	Uji DPD Linier.....	28
3.9	Uji Sargan	29
3.10	Uji Arellano - Bond	29
3.11	Uji Ketidakbiasan	29
BAB IV.....	30
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	30
4.1	Deskripsi Data Penelitian	30
4.2	Analisis dan Pembahasan.....	30
4.2.1	Uji Sargan	31
4.2.2	Uji Arellano - Bond	31
4.2.3	Uji Ketidakbiasan.....	32
4.2.4	Uji FD-GMM.....	33
4.3	Analisis Ekonomi.....	34

4.3.1 Analisis pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan	34
4.3.2 Analisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan	35
4.3.3 Analisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan.....	35
4.3.4 Analisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan	36
BAB V	37
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	37
5.1. Kesimpulan.....	37
5.2. Implikasi.....	37
LAMPIRAN.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2011-2021.....	1
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran terbuka (dalam persen) Provinsi Jawa Tengah.....	3
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2011-2021.....	5
Tabel 1.4 Inflasi (dalam persen) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2021.....	6
Tabel 2.1 . Kajian Pustaka.....	11
Tabel 4.1 Uji Sargan.....	31
Tabel 4.2 Uji Arellano-Bond.....	31
Tabel 4.3 Uji Tidakbiasan	32
Tabel 4.4 Uji FD-GMM.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	23
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Teddy Christianto, 2013). Indonesia berada pada golongan negara berkembang dan masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks yang harus diselesaikan.

Permasalahan nasional yang saat ini dialami Provinsi Jawa Tengah ialah besarnya angka kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi seperti yang dapat dilihat pada data Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 2011 sampai 2021 dapat dilihat bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah berada pada angka yang cukup serius dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Hal ini juga ditandai dengan masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan cukup banyak masyarakat usia produktif yang menjadi pengangguran. Ini menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat (Wijayanto, 2010).

Tabel 1. 1JumlahPenduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2011 – 2021

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk miskin (Persen)
2011	5256.00	16.21
2012	4863.50	14.98
2013	4811.30	14.44
2014	4561.82	13.58
2015	4577.00	13.58
2016	4506.89	13.27

2017	4450.72	13.01
2018	3897.20	11.32
2019	3743.23	10.80
2020	3980.90	11.41
2021	4109.75	11.79

Sumber data: jateng.bps.go.id

Kemiskinan dapat diartikan sebagai rendahnya pemenuhan suatu standar hidup di mana tingkat kekurangan materi dalam bentuk sandang dan pangan pada sejumlah atau kelompok orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum terjadi di masyarakat. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinanyang masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah didapatkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada bulan Maret 2021 sebesar 11.79% atau 4.11 juta jiwa. Meskipun demikian Jawa Tengah pernah meraih peringkat pertama dalam hal penurunan angka kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan sejak lama telah menjadi permasalahan bagi Indonesia khususnya pada Provinsi Jawa Tengah yang angka kemiskinannya saat ini berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional. Maka diperlukan tindakan untuk menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan seperti tingkat pengangguran, IPM, PDRB, dan inflasi.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama oleh pemerintah. Pengangguran tidak hanya mengenai jumlah tenaga kerja yang kurang terakomodir tetapi juga terdapat nilai-nilai pendidikan yang belum bisa di terapkan di ilmunya dalam siklus perusahaan atau produksi. Menurut Sukirno (1994) pengangguran yaitu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum

mendapatkannya. Alasan utama yang memicu timbulnya pengangguran yaitu rendahnya tingkat pengeluaran agregat.

Pengangguran memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Dalam kasus negara berkembang atau negara maju, fenomena berikut ialah kondisi yang kehadirannya tak terhindarkan. Pengangguran mempunyai batasan yang perlu di perhatikan karena fenomena tersebut memiliki dampak krusial akan timbulnya permasalahan kerawanan beragam tindakan kriminal, gejala sosial, politik serta kemiskinan (Amalia, 2012)

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran terbuka (dalam persen) Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Tingkat pengangguran terbuka (persen)
2011	7.07
2012	5.61
2013	6.01
2014	5.68
2015	4.99
2016	-
2017	4.57
2018	4.47
2019	4.44
2020	6.48
2021	5.95

Sumber data: jateng.bps.go.id

Dari data BPS di Tabel 1.2 tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Tengah tertinggi pada tahun 2020 sebesar 6.48 persen, hal ini dikarenakan masyarakat terkena dampak dari pandemi covid-19 di mana pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan karantina dan dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan di

seluruh daerah untuk memutus mutasi penyebaran virus covid-19. Adanya pembatasan kegiatan membuat proses produksi menjadi terhambat sehingga banyak perusahaan mengalami kerugian dan terpaksa harus melakukan pemutusan kerja karyawan (PHK) untuk menekan biaya kerugian sehingga kejadian tersebut menaikkan lagi angka pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Namun pada tahun 2021 angka pengangguran mulai dapat ditekan menjadi 5.95 persen, dengan adanya upaya pemulihan pasca pandemi covid-19 dimana pemerintah banyak mengeluarkan bantuan subsidi yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga bantuan usaha agar masyarakat dapat kembali produktif melalui program UMKM yang diharapkan dapat terus berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran dapat kembali turun.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Todaro (2013). Banyaknya tenaga kerja memungkinkan adanya kenaikan kegiatan ekonomi dan tingkat produksi meningkat. Kemudian dapat berpengaruh negatif atau positif dari penambahan populasi penduduk ditentukan oleh kemampuan sistem ekonomi pada wilayah tersebut dalam menyerap dan secara konsisten dapat mengelola manfaat pertambahan besaran tenaga kerja pada wilayah tersebut.

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menjadi salah satu faktor penentu kemiskinan suatu daerah karena berhubungan dengan daya produksi yang mampu diciptakan oleh suatu perekonomian. Apabila PDRB rendah maka dapat dikatakan daya dan kemampuan produksi yang dimiliki rendah dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun
2011-2021

Tahun	IPM Provinsi Jawa tengah (Metode Baru)
2011	66.64
2012	67.21
2013	68.02
2014	68.78
2015	69.49
2016	69.98
2017	70.52
2018	71.12
2019	71.73
2020	71.87
2021	72.16

Sumber data: jateng.bps.go.id

Melalui Tabel 1.3 bisa ditarik kesimpulannya yakni IPM Provinsi Jawa Tengah meningkat mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Adanya peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya diduga menyebabkan kenaikan produktivitas kerja seseorang.

Apabila terjadi kenaikan produktivitas individu maka akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah menurun. Apabila IPM mengalami peningkatan maka masyarakat turut mengalami peningkatan kesejahteraan. Dan jika kesejahteraan naik maka tingkat kemiskinan menjadi berkurang (Widodo, 2011).

Tingkat kemiskinan tidak hanya berfokus pada jumlah atau kuantitas tetapi juga pada kualitas. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat digunakan sebagai faktor yang mengukur tingkat

kemiskinan di daerah pada waktu tertentu. IPM sebagai sekumpulan data yang sudah diolah mencerminkan kualitas masyarakat suatu wilayah dari segi pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini sangat penting karena apabila IPM baik maka terdapat harapan agar generasi selanjutnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik pula.

Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah akibatnya nilai mata uang akan mengalami penurunan yang pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat. Dengan kata lain jika nilai inflasi naik harga kebutuhan sehari-hari masyarakat akan sulit didapatkan. Dan jika hal tersebut terus terjadi dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan kondisi hiperinflasi dan berakibat negara mengalami krisis.

Tabel 1.4 Inflasi (dalam persen) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2021

Tahun	Inflasi (dalam persen)
2011	2.68
2012	4.24
2013	7.99
2014	8.22
2015	2.73
2016	2.36
2017	3.71
2018	2.82
2019	2.81
2020	0.46
2021	3.87

Sumber data: jateng.bps.go.id

Sesuai Tabel 1.4 inflasi paling rendah berada di tahun 2020 sejumlah 0.46%, serta kenaikan inflasi tertingginya berada di tahun 2014 dengan nilai inflasi 8.22%. Untuk laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dapat saat ini berada di ambang kurang dari 10 persen dan dapat dikategorikan sebagai kategori ringan. Jika fenomena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga pada tingkat yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah maka tidak akan turut serta mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari dan oleh sebab itu tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Tim Pengendali Inflasi serta pemerintah berperan aktif dalam pengendalian nilai inflasi di Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan hasil produksi masyarakat, memperbaiki sistem mekanisme distribusi yang kurang efektif dan mengendalikan harga-harga komoditas masyarakat terutama harga pangan.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah diberi pengaruh berbagai faktor di antaranya indeks pembangunan manusia yang rendah, tidak stabilnya angka inflasi, meningkatnya jumlah pengangguran dan rendahnya pendapatan regional bruto.

Upaya pengentasan kemiskinan oleh pihak pemerintah sepertinya belum mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan sehingga bisa digunakan sebagai referensi dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel pengangguran, PDRB, IPM, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011-2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh variabel PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh variabel IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh variabel inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya ialah yakni:

1. Menganalisis apakah variabel pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis apakah variabel PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis apakah variabel IPM pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis apakah variabel inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang analisis pengaruh pengangguran, PDRB, IPM, dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Bagi masyarakat dan pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi ke depannya

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas :

BAB I : pendahuluan

Dalam BAB I berisi atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Dalam BAB II berisi sumber informasi yang berasal dari penelitian terdahulu dalam kajian pustaka yang mana topiknya sama dengan penelitian yang sedang dibahas, kemudian terdapat landasan teori berisikan penjelasan tentang teori yang akan digunakan peneliti, menjelaskan hubungan antar variabel dalam permasalahan penelitian, membuat kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, penjelasan mengenai variabel penelitian, defenisi operasional variabel dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan pembahasan

Dalam BAB IV berisikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian dan memaparkan hasilnya secara parsial (keseluruhan) beserta hasil analisis data yang diteliti oleh penulis.

BAB V : Kesimpulan dan hasil

Dalam BAB V berisikan informasi dari kesimpulan yang dapat dari hasil dan pembahasan, saran dari permasalahan dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di penulisan skripsi berikut peneliti menemukan berbagai informasi di beberapa penelitian terdahulunya sebagai referensi dan bahan perbandingan terkait kelebihan ataupun kekurangan yang telah tersedia sebelumnya. Peneliti juga mencari referensi informasi dibuku yang bertujuan mendapat informasi yang lebih lengkap dan mendetail yang sudah tersedia mengenai teori yang berhubungan dengan judul “Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, IPM, dan Inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” guna mendapatkan sebuah landasan teori ilmiah.

Penelitian pertama dengan berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah periode 2011-2016 yang dilakukan Novianto (2018). Penelitian ini ditujukan agar mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, serta pengangguran akan kemiskinan di Jawa tengah dalam rentang waktu 2011-2016. Jenis data digunakan menggunakan data sekunder dengan metode analisis penelitian data panel di mana data panel merupakan pengembangan di antara deretan waktu terhadap analisis deret hitung. Penelitian tersebut dikategorikan penelitian kuantitatif dengan penggunaan data panel. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews 9 hasil regresinya dari model *random effect* memperlihatkan pertumbuhan perekonomian, IPM, serta inflasi berdampak negatif pada kemiskinan. Sedangkan pengangguran berdampak positif pada taraf kemiskinan. Sedangkan teruntuk pengujian F variabelnya pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, maupun pengangguran dengan bersamaan berdampak pada taraf kemiskinan.

Penelitian kedua dengan judul “Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia” tujuannya ialah mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan parameter tingkat kemiskinan. Di dalam penelitian ini datanya

yang dipergunakan ialah *crosssection* pada tahun 2017, yang berisikan indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan serta presentase penduduk kemiskinan. Metodenya yang implementasikan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis *multivariant* di mana analisis ini merupakan analisis non hierarki dan hierarki *cluster*. Kesimpulan dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa kemiskinan pada provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Berdasarkan analisis kluster, provinsi dengan indeks kemiskinan tinggi berada pada kelompok 3, kemiskinan sedang berada dalam kelompok 2, dan indeks kemiskinan rendah berada dalam kelompok 1. Selain itu terdapat berbagi penelitian lainnya yang disajikan ditabel berikut

Tabel 2.1 Kajian Pustaka

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Analisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah ¹	Melalui analisis uji F diketahui bahwa pada variabel IPM, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi didapatkan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan. Namun pada variabel pengangguran menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel kemiskinan.	Metode Penelitian : Regresi Data Panel Periode pengamatan : 2011 - 2016	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.
2	Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Ferezegia D vita) 2018 ²	Disimpulkan pada hasil penelitian ini kemiskinan di kategorikan dengan tiga kelompok klauster. dimana wilayah provinsi dengan tingkat kemiskinan yang	Metode Penelitian : :Analisis Multivariant	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

		sangat tinggi masuk dalam kelompok tiga, wilayah yang memiliki indeks kemiskinan sedang berada di kelompok dua, dan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah masuk dalam kelompok satu.	Periode pengamatan : 2017	Objek penelitian : Kemiskinan.
3	Analisis pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Andykha, Handayanti, dan Woyanti) 2018 ⁴	Hasil penelitiannya menjelaskan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh positif serta relevan pada kemiskinan. Kemudian variable pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan yang berarti setiap terjadi peningkatan jumlah pengangguran maka angka kemiskinan juga akan naik. Dari hasil analisis penelitian tersebut peneliti memberikan saran kepada pemerintah berupa pemberlakuan koordinasi yang sistematis dan efektif dengan pemerintah daerah setempat dalam membuat kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.	Metode Penelitian : Fixed Effect Model (FEM) Periode pengamatan : 2011 - 2016	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : Pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, IPM, dan kemiskinan.
4	Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah	Penelitian ini menunjukkan variabel kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerinta, dan	Metode Penelitian : Fixed Effect Model (FEM)	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota

	(Wahyudi & Rejekingsih) 2013 ⁵	pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah	Periode pengamatan : 2007 - 2010	Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : Pengangguran dan kemiskinan.
5	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah (Indah Purboningtyas, Indah Retno Sari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Dwi Agustina, M Al Haris) 2020 ⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Open Unemployment Rate (OUR) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019, IPM tak berdampak pada taraf kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019 serta Tingkat Pengangguran (OUR) maupun IPM tak berdampak pada angka kemiskinan tahun 2010-2019. Dan koefisien determinasinya ataupun R-Square senilai 0,9445.	Metode Penelitian : Regresi Linier Berganda Periode pengamatan : 2010 - 2019	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : Analisis tingkat pengangguran, IPM, dan kemiskinan.
6	Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (Retnowati & Harsuti) 2017 ⁷	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan variabel Pengangguran mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, variabel pertumbuhan ekonomi regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan variabel inflasi berhubungan positif dengan tingkat kemiskinan.	Metode Penelitian : Regresi Data Panel Periode pengamatan : 2009 - 2014	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : Inflasi dan kemiskinan.

7	Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia.(Leonita L, Sari RK.)2019 ⁸	Yang dapat disimpulkan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti. Ditemukan bahwa variabel laju PDRB, IPM, dan pengangguran menunjukan pengaruh melalui uji parsial terhadap tingkat kemiskinan. Pada variabel IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Yang berarti jika terjadi kenaikan nilai IPM maka kemiskinan akan turun.	Metode Penelitian : Analisis Regresi Berganda Periode pengamatan : 2011 - 2017	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : PDRB, pengangguran, IPM, dan kemiskinan.
8	Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah (Bintang) 2018 ⁹	Dihasil penelitiannya menjelaskan pertumbuhan PDRB berdampak positif serta relevan pada taraf kemiskinan. Tingkatan rata-rata lama sekolah serta tingkatan harapan hidup berdampak negatif serta relevan pada tingkatan kemiskinan. Disisi lainnya, tingkatan pengangguran berdampak positif serta relevan pada tingkatan kemiskinan.	Metode Penelitian : Fixed Effect Model Periode pengamatan : 2011 - 2015	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : PDRB, pengangguran, dan Kemiskinan
9	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016 (Giovanni) 2018 ¹⁰	Dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil yang menunjukkan variabel PDRB berdampak positif serta relevan pada kemiskinan pada setiap provinsi di pulau jawa. Ini dikarenakan adanya peningkatan PDRB yang terjadi setiap tahunnya dapat terdistribusikan ke	Metode Penelitian : Regresi Data Panel Periode pengamatan : 2009 - 2016	Lokasi Penelitian : Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian : PDRB, pengangguran, dan kemiskinan.

		semua kalangan kelas masyarakat yang ada di wilayah provinsi tersebut dan hal fenomena tersebut yang membuat angka kemiskinan menjadi turun.		
--	--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dari sisi ekonomi kemiskinan diartikan sebagai suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan non-makanan dinilai dari sisi pengeluaran. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk miskin yaitu penduduk yang rata-rata pengeluaran perbulannya berada dibawah garis kemiskinan (garis kemiskinan makanan dan non-makanan).

Menurut Houghton, Jonathan dan Shahidur. (2010) kemiskinan selalu berhubungan dengan sesuatu hal yang rentan dan timpang karena orang yang tadinya tidak masuk dalam kategori miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan. Misalnya karena PHK, krisis ekonomi ataupun bencana alam. Dalam aspek kesejahteraan, kerentanan menjadi suatu dimensi yang bersifat pokok karena mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal aktivitas ekonomi.

Menurut N Nurwati (2008) kemiskinan yaitu permasalahan sosial yang terus ada dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Permasalahan kemiskinan terjadi dalam waktu yang panjang dan sangat lama sama seperti halnya dengan usia peradaban manusia itu sendiri. Unsur pokok permasalahan kemiskinan yaitu menyangkut berbagai macam karakteristik kehidupan manusia. Sifat dari permasalahan

kemiskinan yaitu mendunia, artinya udah menjadi perhatian bersama masyarakat dunia dan permasalahan tersebut ada pada semua negara.

Menurut Prastyo, A.A. (2010) kemiskinan adalah adanya rasa ketidakberdayaan yang pada akhirnya mendorong terciptanya kerentanan dalam menghadapi situasi yang terjadi pada dirinya sendiri sehingga memunculkan ketergantungan dan keterasingan yang bersifat geografis maupun sosiologis.

2.2.2 Jenis-jenis Kemiskinan

Dalam studi ekonomi dapat dikelompokkan beberapa jenis kemiskinan berdasarkan penyebab terjadinya. Menurut Khomsan, Ali, et al. 2015. jenis-jenis kemiskinan berdasarkan penyebabnya yaitu :

a. Kemiskinan Subjektif

Seseorang menetapkan dirinya sendiri masuk dalam kategori miskin atas dasar pemikirannya sendiri meskipun pada kenyataannya orang tersebut tidaklah miskin.

b. Kemiskinan Absolut

Seseorang atau keluarga mempunyai penghasilan yang berada di bawah garis kemiskinan atau standar kelayakan yang berlaku. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lain.

c. Kemiskinan Relatif

Pengaruh kebijakan pemerataan pembangunan yang belum masuk ke dalam semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan masyarakat.

d. Kemiskinan Alamiah

Alam sekitar tempat tinggal langka akan sumber daya alam. Sehingga hal ini berakibatnya pada rendahnya tingkat produktivitas masyarakat.

e. Kemiskinan Kultural

Sikap masyarakat yang budaya santai dan enggan untuk menaikkan taraf hidupnya sehingga terjebak dalam kemiskinan terus meneruskan diwariskan pada generasi berikutnya.

f. Kemiskinan Struktural

Tidak adanya kemampuan dari sisi struktur sosial untuk menghubungkan antara masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu dapat juga diakibatkan oleh tingkat akses sumber daya yang rendah dalam sistem sosial budaya maupun sosial politik.

2.2.3 Pengangguran

Menurut Suroto (1992) penganggur adalah orang yang secara kemampuan dapat bekerja akan tetapi belum memiliki pekerjaan serta memiliki keinginan untuk bekerja secara aktif atau pun pasif. Pengangguran dalam ekonomi makro berarti menjadi anggota masyarakat angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan. Sedangkan pada ekonomi mikro pengangguran merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan melakukan pekerjaan namun saat itu tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran yang dibahas dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka.

2.2.4 Jenis-jenis Pengangguran

Dalam studi ekonomi dikenal beberapa jenis-jenis pengangguran. Menurut Sukirno (2004) setidaknya terdapat 4 jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu :

a. Pengangguran Siklikal

Tenaga kerja belum mendapat pekerjaan karena adanya siklus ekonomi. Ketika perekonomian sedang naik maka perusahaan akan membuka banyak lowongan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran turun dan begitu juga sebaliknya. Apabila perekonomian sedang lesu maka perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran naik. Sederhananya permintaan agregat terhadap pekerja lebih kecil dibanding dengan penawaran agregat.

b. Pengangguran Friksional atau Normal

Tenaga kerja ingin mendapatkan pekerjaan yang dinilai lebih baik. Baik itu dari segi upah, kesesuaian dengan skill, ataupun jarak dengan tempat tinggal. Pengangguran friksional terjadi karena tenaga kerja kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan atau pemberi kerja.

c. Pengangguran Struktural

Terdapat perubahan struktur sosial sehingga membuat ketidakseimbangan antara keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keahlian yang dibutuhkan dipasar tenaga kerja.

d. Pengangguran SDM

Dalam proses produksi terdapat penggantian SDM dengan mesin dengan tujuan untuk efisiensi. Sehingga SDM yang tersedia tidak dapat masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan akhirnya menjadi pengangguran.

2.2.5 PDRB

Menurut BPS (2012) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar merupakan jumlah total dari nilai tambah bruto (*gross value added*) yang ditimbulkan akibat aktivitas produksi pada semua bidang perekonomian disuatu daerah. Nilai tambah merupakan nilai yang bertambah atas penggabungan faktor produksi serta bahan baku pada tahap produksi. Perhitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangkan biaya antara. Nilai tambah bruto disini memuat pendapatan faktor (upah serta gaji, bunga, sewa tanah maupun laba), akumulasi penyusutan serta pajak tak langsung neto. Sehingga penjumlahan nilai tambah bruto melalui tiap bidang serta penjumlahan nilai tambah bruto dari semua bidang bisa didapatkan PDRB terhadap dasar harga pasar.

Todaro (2013) mengatakan, PDRB yaitu jumlah nilai keseluruhan terhadap semua luaran akhir yang diperoleh

perekonomian ditingkat daerah. Baik yang dilaksanakan warga daerah setempat ataupun daerah lainnya yang bertempat di daerah tersebut.

PDRB yaitu jumlah nilai tambah yang diperoleh dari semua unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

2.2.6 Jenis-Jenis PDRB

Untuk menghitung besarnya PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan nilai total produk serta layanan yang diproduksi beragam unit produksi di wilayah suatu daerah berjangka waktu tertentu (umumnya satu tahun).

b. Pendekatan Pengeluaran

PDRB ialah keseluruhan faktor permintaan akhir, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga serta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan aset tetap domestik bruto, perubahan persediaan, serta ekspor neto, selama periode tertentu (umumnya satu tahun).

c. Pendekatan Pendapatan

PDRB ialah totalan imbalan yang diperoleh beberapa faktor produksi disuatu daerah atau wilayah berjangka waktu tertentu.

2.2.7 IPM

Menurut BPS (2009) IPM yaitu suatu ukuran capaian mengenai pembangunan berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melekat Huruf (AMH), dan PDB perkapita.

IPM biasanya dipakai guna mengelompokkan apakah negara ialah maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain itu

IPM juga dipakai guna menghitung kebijaksanaan perekonomian terhadap mutu kehidupan masyarakat.

Sen A (1999)¹¹ mengatakan, “kelaparan terjadi bukan karena kekurangan bahan pangan melainkan karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan”. Kondisi tersebut terjadi sebab terdapat sistem sosial yang tak adil. Penyebabnya kelaparan lebih sering dikarenakan faktor ekonomi maupun sosial misalnya penurunan gaji pekerja, meningkatnya pengangguran, kenaikan harga bahan pangan serta melemahnya mekanisme distribusi.

2.2.8 Manfaat IPM

IPM sebagai suatu pengukuran terhadap kualitas hidup masyarakat memiliki banyak manfaat terutama untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerataan pembangunan negara. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain adalah mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat, sebagai penentu dalam peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia, sebagai data strategis ukuran kinerja pemerintah

2.2.9 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga yang berlaku dalam suatu kegiatan perekonomian. Inflasi memiliki tingkat yang berbeda dengan pembagian periode waktu tertentu. Dan setiap negara menetapkan tingkat inflasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan negaranya. Saat ini terdapat tiga jenis tingkatan inflasi yang pertama tingkat inflasi yang berada di bawah 3 atau 2 persen dikategorikan sebagai tingkat inflasi rendah, yang kedua tingkat inflasi yang mencapai 10 atau 4 persen dapat dikatakan sebagai inflasi moderat, dan bila peningkatan inflasi hingga angka puluhan ataupun ratusan persen dalam setahun maka dapat dikategorikan sebagai tingkat inflasi yang serius. Apa bila inflasi tetap terjadi dalam periode waktu yang lama dan kenaikan inflasi masih terus

berlanjut maka negara tersebut dapat dikategorikan mengalami hyperinflasi.

2.2.10 Jenis-jenis Inflasi

Menurut Karim (2007) Inflasi dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti berikut ini :

a. Moderateinflation

Inflasi jenis ini terjadi dengan ditandai oleh mulai meningkatnya harga-harga barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu yang lambat yang sering juga disebut sebagai fenomena inflasi satu digit pertahun yang berarti setiap periode persentase nilai inflasi secara reguler mengalami kenaikan. Masyarakat memiliki asumsi bahwa pergerakan tingkat harga tidak akan bergerak terlalu signifikan.

b. Gallopinginflation

Karakteristik dari inflasi jenis ini ditandai oleh fenomena kenaikan harga barang secara signifikan dalam kurun waktu yang tertentu. Untuk ketentuan besaran presentasi inflasi dimulai dari 20 persen hingga angka 200 persen per tahun. Terjadinya *galloping inflation* akan mengakibatkan nilai uang beredar di masyarakat mengalami penyusutan sehingga masyarakat cenderung akan menahan pengeluaran dan menyimpan kekayaan berupa aset riil. kejadian ini tentunya akan berimbas lagi pada kegiatan di pasar uang dimana biaya umum akan diberikan sesuai rasio dibandingkan dengan taraf bunga.

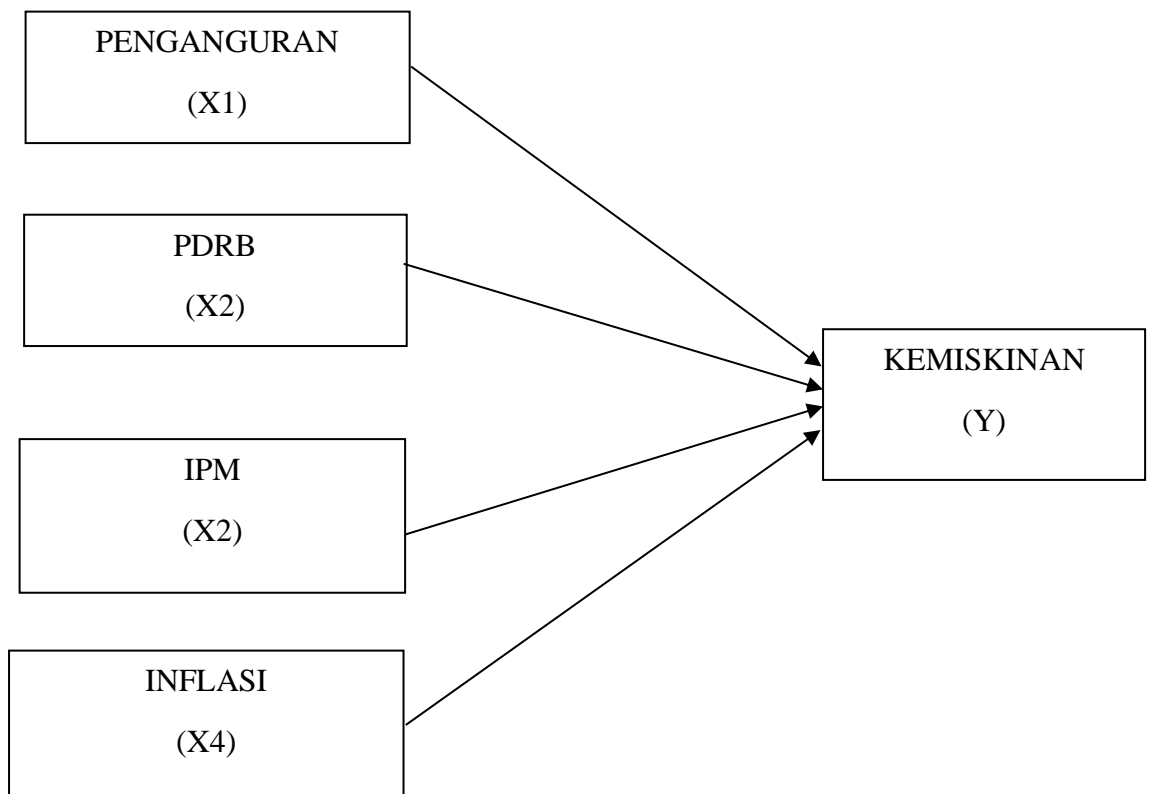
c. Hyperinflation

Jenis ini merupakan kategori terburuk dari inflasi dimana sebuah negara dapat dikategorikan mengalami *hyperinflation* jika harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai empat digit per tahun. Kategori presentasi nilai inflasi sebuah negara di katakan

mengalami *hyperinflation* dimulai dari jutaan sampai dengan mencapai milyaran persen per tahun. Kondisi ini akan membuat nilai uang yang beredar menjadi tidak berharga dan masyarakat akan cenderung tidak menggunakan dan menyimpan uang yang nilainya merosot tajam.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Agar mempermudah penelitian yang hendak dilaksanakan beserta guna memperjelaskan alur pemikirannya, berikut merupakan gambar kerangka pemikiran yang skematis, yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4 Hipotesis Penelitian

Dari landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, serta berdasarkan pengamatan hubungan antar variabel dependen dengan variabel

independennya terdapat beberapa hipotesis yang mendasari penelitian sebagai berikut :

1. Diduga variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan.
2. Diduga variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan.
3. Diduga variabel IPM berpengaruh negatif terhadap variabel kemiskinan.
4. Diduga variabel inflasi berpengaruh positif terhadap variabel kemiskinan.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder merupakan data yang digunakan atau diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. (S. Suliyanto dan S. MM. 2017). Atau secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa dokumen atau literatur yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu pengukuran yang darisisi ekonomi dinilai sebagai ketidakmampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Berdasarkan BPS angka minimal yang harus dipenuhi individu agar tidak dikatakan miskin yaitu 2100 kalori perkapita perhari. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data garis kemiskinan per kapita dengan satuan Rupiah pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2021 dan data bersumber dari BPS serta .

3.2.2 Variabel Independen

a. Pengangguran

Pengangguran secara sederhana diartikan sebagai individu yang belum atau tidak memiliki pekerjaan dan termasuk dalam angkatan kerja. Dalam penelitian ini digunakan data tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah tahun 2011-2021 dengan penyajian satuan data persen.

b. PDRB

PDRB yaitu jumlah total nilai jasa yang dihasilkan oleh suatu tingkat perekonomian dalam suatu wilayah dalam periode tertentu dan biasanya dalam waktu satu tahun. Dalam penelitian ini digunakan data

PDRB di Jawa Tengah tahun 2011-2021 dengan satuan penyajian data Rupiah.

c. IPM

IPM yaitu indeks untuk mengukur tingkat kualitas manusia dalam suatu masyarakat dengan beberapa data yang dijadikan sebagai komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan PDB per kapita. Dalam penelitian ini digunakan data IPM di Jawa Tengah tahun 2011-2021 dengan penyajian data satuan Rupiah.

d. Inflasi

Inflasi yaitu kondisi saat harga-harga barang dan jasa mengalami peningkatan yang berkala dalam kurun periode waktu tertentu sehingga menyebabkan nilai mata uang mengalami penurunan. Dalam penelitian ini menggunakan data inflasi di Jawa Tengah tahun 2011-2021 dengan penyajian data satuan persen.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini mencoba mencari tau mengenai pengaruh pengangguran, PDRB, IPM, inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah diperlukan data *crosssection* serta diperlukan juga observasi perilaku unit penelitian di dalam kurun waktu tertentu (*time series*). Gabungan dari kedua data tersebut di sebut dengan data panel dan dalam penelitian ini akan menggunakan regresi data panel dinamis dalam proses pengolahannya.

Regresi data panel dinamis dipakai guna mencari tahu hasil observasinya yang berupa data panel. Ada tiga model regresi data panel dinamis yang dapat digunakan yaitu model FD-GMM, SYS-GMM dan DPD Linier.

3.4 Data Panel Dinamis

Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950 yang merupakan data gabungan antara data lintas-waktu (*time series*) dan data lintas-individu (*cross section*). Menurut Widarjono (2015) data panel merupakan penggabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Terdapat dua jenis

model data panel yaitu panel statis dan panel dinamis. Pada penelitian ini menggunakan model data panel dinamis linier.

Data panel dinamis merupakan metode regresi dengan menambahkan lag pada variabel dependen (Y_{t-1}) untuk digunakan sebagai variabel independen (Saryana, 2020). Selain itu, lag merupakan selang waktu yang mana variabel terikat (Y) dapat merespon variabel bebas (X) dengan selang waktu (Gujarati, 2004). Analisis panel dinamis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indra (2009) menjelaskan bahwa hubungan antar variabel ekonomi memiliki kecenderungan yang bersifat dinamis. Korelasi dinamis berikut di karakteristik oleh kehadiran lag variabel dependen (variabel *eksplanatori*) diantara variabel *regresornya* yang berhubungan dengan error.

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + x'_{it} \beta + u_{it}; i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$$

δ ialah suatu skalar, x'_{it} ialah vektor baris berukuran K serta β adalah vektor kolom berukuran K. dimana, $u_{it} = \mu_i + v_{it}$ dengan $\mu_i \sim IID(0, \sigma_\mu^2)$) mengatakan pengaruh individu serta $v_{it} \sim IID(0, \sigma_v^2)$ terdapat autokorelasi yang saling bebas satu sama lainnya. Autokorelasi dikarenakan terdapat lag variabel dependennya selaku regresor serta dampak individu yang heterogenitas diantara variable. y_{it} merupakan fungsi dari μ_i maka $y_{i,t-1}$ juga merupakan fungsinya dari μ_i maka bisa timbul hubungan diantara variabel regresornya $y_{i,t-1}$ dengan u_{it} yang mengakibatkan penduga PLS menjadi bias serta inkonsisten walaupun v_{it} tak terdapat hubungan sekalipun. Kondisi berikut menimbulkan permasalahan *endogeneity* bila model diestimasi dengan pendekatan FE (*Fixed effects*) atau pun *random effects* kemudian memperoleh dugaan bias serta tak konsisten.

3.6 first-difference Generalized Method of Moment (FD-GMM)

FD-GMM diperkenalkan Arellano, M., dan Bond, S. (1991).. Pendekatannya ini memperoleh penduga takbias, konsisten, serta efisien.

Adapun modelnya data panel dinamis sederhana tanpa menyertakan variabel eksogen:

Arellano, M., dan Bond, S. (1991). mengatakan, alat tambahan didapat dimodel data panel dinamis jika berkondisi *ortogonalit* yang berada di antara nilai lag dari y_{it} dan gangguan v_{it} .

Penduga FD-GMM bisa terkendala oleh bias sampel terbatas (Blundell, R., & Bond, S. (1998)). *Pooled least square* memberi suatu estimasi dengan bias menuju atas (*biasedcupward*) dengan kehadiran dampak individu (*individual-specific effect*). Disisi lainnya, *fixed effect* bisa memberi dugaan terhadap bias ke bawah. Kemudian penduga konsisten bisa diekspektasikan diantara penduga *pooled least square* ataupun *fixed effect*. Jika penduganya FD-GMM dekat ataupun dibawah penduga *fixed effect* sehingga kemungkinannya penduga FD-GMM akan bias kebawah yang bisa dipengaruhi melemahnya instrumen.

3.7 Estimasi Model data panel System Generalized Method of Moments

GMM ialah perluasan dari metode momen. GMM menggunakan momen keadaan dari populasi serta sampel. Apabila diamati sejumlah N observasi pengamatan, sehingga persamaannya teruntuk pengamatan ke- i tanpa periode.

Metode system GMM dipakai guna menganalisis sistem persamaan baik pada *first-differenced* ataupun ditingkatan instrumen yang dipergunakan ditingkatan level ialah seri dari lag *first differenced*. Apabila variabelnya terindikasi lemah, sehingga indikator yang proses GMM-diff tetap mengalami bias kebawah. Metodenya ini kemudian disempurnakan Blundell dan Bond . Metodenya sistem GMM tersebut dinamakan pula metode yang diperluas (extended GMM). Blundell dan Bond mengajukan supaya persamaannya dalam *first differenced* digabungkan dengan persamaan berbentuk level supaya variabelnya yang dipergunakan tetap orthogonal pada λ_i , Variabel lag berbentuk level semestinya berhubungan dengan λ_i maka diperlukan kondisi yang memungkinkan hubungan diantara variabel penjelas serta λ_i . Blundell dan Bond memaparkan dimodel *autoregressive distributed lag*, seri dari *first differenced*

kemungkinan untuk tak miliki hubungan korelasi dengan λ_i asalkan seri tersebut mempunyai nilai rata-rata yang stasioner. Kondisi tersebut memungkinkan *lagged first differenced* dipergunakan menjadi alat dipersamaan berbentuk level. Ketepatannya alat yang pergunakan bisa instrument diujikan melalui *Sargantest of over identifying restrictions*.

3.8 Uji DPD Linier

Model data panel dinamis linier merupakan model yang menyertakan variabel dependen lag sebagai kovariat bersama dengan efek yang tidak teramati, regresi tetap atau acak, dan eksogen. Dengan panel-level-effect yang tidak teramati membuat estimator standar tidak konsisten. Kehadiran variabel dependen lag memungkinkan untuk dilakukan pemodelan dengan mekanisme parsial (keseluruhan). Estimasi data panel dinamis linier biasanya disimbolkan dengan *xtdpd*.

Model Persamaan Panel Dinamis Linier

$$y_{it} = \sum_{j=1}^p \alpha_j y_{i,t-j} + X_{it}\beta_1 + w_{it}\beta_2 + v_i + \varepsilon_{it} \quad i = \{1, \dots, N\}; t = \{1, \dots, T_i\}$$

Dimana :

$\alpha_1, \dots, \alpha_p$ adalah parameter p yang akan diestimasi.

X_{it} $1 \times k_1$ vektor kovariat yang sangat eksogen.

β_1 $k_1 \times 1$ vektor parameter yang akan diestimasi.

w_{it} $1 \times k_2$ vektor kovariat yang telah ditentukan.

β_2 $k_2 \times 1$ vektor parameter yang akan diestimasi

v_i adalah *panel-level-effect* (yang mungkin berkorelasi dengan X_{it} atau w_{it}), dan ε_{it} adalah i.i.d atau berasal dari proses moving-average yang bergerak pada tingkat rendah dengan varians σ_ε^2 .

3.9 Uji Sargan

Untuk memastikan validitas dari penggunaan variabel instrumen yang jumlahnya dapat melebihi jumlah parameter yang diestimasi atau biasa disebut dengan kondisi *overidentifying restriction*. Pada uji sargan H_0 menjelaskan bahwa tidak terdapat korelasi variabel instrumen dengan error yang berarti instrumen tersebut dinyatakan valid.

3.10 Uji Arellano - Bond

Arellano dan Bond (1991) memperkenalkan suatu metode guna melakukan pengujian bahwa tak adanya hubungan serial orde kedua dari error dipersamaan *first difference*. Δv_{it} adalah bentuk *first differencing* dari error yang tak berkorelasi $E(\Delta v_{it}, \Delta v_{it-1})$ tak diharuskan untuk bernilai nol, tetapi konsistensi nilai estimator tergantung pada asumsi $E(\Delta v_{it}, \Delta v_{it-2}) = 0$, maka hipotesis null mengatakan Δv_{it} dan Δv_{it-2} tidak memiliki korelasi serial ataupun biasa disebut dengan *random walk*.

3.11 Uji Ketidakbiasan

Dalam Uji ketidakbiasan dilakukan menggunakan estimator yang berasal dari *pooled least squares* (PLS) yang bersifat *biased upwards* (bias ke atas) dan estimator dari *fixed-effect* yang bersifat *biased downward* (bias ke bawah). Syarat estimator ketidakbiasan terpenuhi apabila, apabila berada di antara keduanya (PLS dan fixed-effect)

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini berisi data ringkasan statistik. Adapun data statistik pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan dugaan pengaruh variabel independen pengangguran, PDRB, IPM, dan Inflasi terhadap variabel dependen kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis *first-difference Generalized Method of Moment* (FD-GMM) dengan alat pengolahan menggunakan aplikasi software Eviews 12.

4.2 Analisis dan Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dinamis serta menggunakan metode *first-difference Generalized Method of Moment* dengan alat pengolahan software Eviews 12. Pendekatan kuantitatif adalah menghimpun data berupa angka dan menguji hipotesis sebelumnya dengan menggunakan variabelin dependen dan variabel dependen serta proses analisis dilakukan secara sistemik dan aritmetik.

Penduga FD-GMM bisa terkendala oleh bias sampel terbatas (Blundell, R., & Bond, S. (1998).). *Pooled least square* memberi suatu estimasi dengan bias menuju atas (*biasedcupward*) dengan kehadiran dampak individu (*individual-specific effect*). Disisi lainnya, *fixed effect* bisa memberi dugaan terhadap bias ke bawah. Kemudian penduga konsisten bisa diekspektasikan diantara penduga *pooled least square* ataupun *fixed effect*. Jika penduganya FD-GMM dekat ataupun dibawah penduga *fixed effect* sehingga kemungkinannya penduga FD-GMM akan bias kebawah yang bisa dipengaruhi melemahnya instrumen. Terdapat beberapa keunggulan model data panel dinamis yang harusenuhi yaitu validitas instrumen, konsistensi, dan ketidakbiasan.

4.2.1 Uji Sargan

Tabel 4.1 uji sargan

Effects Specification			
Cross-section fixed (first differences)			
Mean dependent var	0.051909	S.D. dependent var	0.020948
S.E. of regression	0.027581	Sum squared resid	0.235828
J-statistic	35.58064	Instrument rank	36
Prob(J-statistic)	0.261368		

Syarat pada uji sargan harus gagal menolak H0 dikarenakan tidak ada korelasi antara instrumen variabel dengan komponen error, pada hasil olah data berikut menghasilkan Probabilitas (J-ststistic) adalah 0.61 yang berarti gagal menolak H0. Maka terdapat hubungan atau korelasi antara *error* serta nilainya *overidentifying restrictions* terdeteksi tidak ditemukan permasalahan terhadap validitas instrumen ataupun keadaan *overidentifying* dipendugaan disimpulkan model valid. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji sargan terpenuhi yaitu instrumen yang digunakan dinyatakan valid.

4.2.2 Uji Arellano - Bond

Tabel 4.2 Uji Arellano - Bond

Arellano-Bond Serial Correlation Test
Equation: Untitled
Date: 04/07/23 Time: 19:03
Sample: 2011 2021
Included observations: 315

Test order	m-Statistic	rho	SE(rho)	Prob.
AR(1)	-1.185397	-0.057328	0.048362	0.2359
AR(2)	-0.377592	-0.003747	0.009922	0.7057

Ho : Tidak terdapat autokorelasi ordo 2 (konsisten)

Ha : Terdapat autokorelasi ordo 2 (tak konsisten)

Berdasarkan hasil pengolahan data Uji Arellano – Bond pendekatan FD GMM dapat diketahui bahwa nilai Prob AR(2) = 0.7057 nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0.05$ sehingga gagal menolak H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat konsistensi pada uji Arellano-Bond sudah terpenuhi.

4.2.3 Uji Ketidakbiasaan

Tabel 4.3 Uji Ketidakbiasaan

PLS	FD-GMM	FEM
0.95	0.408	0.83

Syarat pada uji ketidakbiasaan apabila data FD-GMM berada diantara FEM dan PLS. Pada hasil pengolahan Eviews menunjukkan nilai FEM = 0.83 > FD-GMM = 0.408 < PLS = 0.95 Sehingga syarat tidak biasan belum terpenuhi, hal ini terjadi akibat konsekuensi dari syarat tidakbiasan belum berada diantara FEM dan PLS.

4.2.4 Uji FD-GMM

Tabel 4.4 Uji FD-GMM

Dependent Variable: LOG(KEM)
 Method: Panel Generalized Method of Moments
 Transformation: First Differences
 Date: 04/07/23 Time: 18:47
 Sample (adjusted): 2013 2021
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 315
 White period (period correlation) instrument weighting matrix
 White period (cross-section cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)
 Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering
 Instrument specification: @DYN(LOG(KEM),-2)
 Constant added to instrument list

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(KEM(-1))	0.408749	0.009464	43.19182	0.0000
PENGANGGURAN	0.015160	0.000389	38.96291	0.0000
LOG(PDRB)	0.009292	0.010473	0.887234	0.3812
IPM	0.053713	0.000928	57.87948	0.0000
INF	0.000747	0.000139	5.358909	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (first differences)			
Mean dependent var	0.051909	S.D. dependent var	0.020948
S.E. of regression	0.027581	Sum squared resid	0.235828
J-statistic	35.58064	Instrument rank	36
Prob(J-statistic)	0.261368		

Berdasarkan hasil estimasi FD-GMM :

- 1) Lag periode sebelumnya dari variabel kemiskinan memiliki nilai p-value sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ yang berarti menolak H_0 , sehingga berpengaruh signifikan. Kemudian nilai koefisien sebesar 0.408749 bernilai positif, yang artinya setiap satu persen pertambahan kemiskinan pada periode sebelumnya kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah bertambah 0.408749 persen unit.
- 2) Variabel pengangguran memiliki nilai p-value sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$ yang berarti menolak H_0 , sehingga berpengaruh signifikan. Kemudian nilai koefisien sebesar 0.015160 serta memiliki nilai positif artinya setiap kenaikan satu persen pengangguran maka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan kemiskinan sebesar 1.5 persen unit.

- 3) Variabel PDRB memiliki nilai p-value sebesar 0.3812 lebih besar dari nilai $\alpha = 0.05$, sehingga berpengaruh tidak signifikan. Kemudian nilai koefisien sebesar 0.009292 memiliki nilai positif, artinya setiap peningkatan satu persen nilai PDRB maka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah akan bertambah sebesar 0.009292 persen unit.
- 4) Variabel IPM memiliki nilai p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ sehingga menolak H_0 dan berpengaruh signifikan. Kemudian nilai koefisien 0.053173 memiliki nilai positif, artinya setiap kenaikan satu unit IPM maka kemiskinan akan bertambah sebesar 0.053173 persen unit.
- 5) Variabel inflasi memiliki nilai p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ sehingga menolak H_0 dan berpengaruh signifikan. Kemudian nilai koefisien 0.000747 memiliki nilai positif, artinya setiap kenaikan 1 persen inflasi maka kemiskinan akan bertambah sebesar 0.000747 persen unit.

4.3 Analisis Ekonomi

4.3.1 Analisis pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan

Variabel pengangguran direpresentasikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam rentang tahun 2011 – 2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, diketahui setiap kenaikan jumlah pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya tersebut selaras pendapatnya Todaro yang mengatakan terdapat permasalahan pengangguran memiliki kaitan yang sangat erat dengan masalah kemakmuran masyarakat umum. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran dalam suatu daerah. Hal serupa juga dipaparkan penelitiannya Bintang (2018) yang membahas tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa tengah tahun 2011 – 2015 di mana dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut juga sesuai dengan dugaan hipotesis awal yang menyatakan bahwa variabel pengangguran diduga berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.3.2 Analisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan

Variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto dalam rentang tahun 2011 – 2021 berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, setiap peningkatan nilai PDRB akan meningkatkan juga angka jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dan berdasarkan dugaan awal disimpulkan bahwa variabel PDRB dinyatakan tidak sesuai dengan hipotesis. Jika terjadi peningkatan nilai PDRB tidak akan mempengaruhi kemiskinan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasad, B. C. (1998) memperoleh hasil yang sama, yaitu tidak ada hubungan yang konkret antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Beberapa negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut Prasad, B. C. (1998) pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas pada aspek sosial, institusional, dan politik suatu negara atau daerah akan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang. Le Goff, M., & Singh, R. J. (2014) juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan jika unsur kelembagaan negara atau daerah tersebut tertata dengan baik.

4.3.3 Analisis pengaruh IPM terhadap kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 2011 – 2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat disimpulkan setiap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia akan menaikkan angka kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator ekonomi untuk mengetahui dan mengukur tingkat harapan hidup dan produktivitas sumber daya manusia dalam suatu daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ema Dian Ristika et al. 2020. menghasilkan kesimpulan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan alasan terdapat hubungan positif antara Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan di sebabkan oleh kualitas pembangunan manusia yang belum bisa memberikan manfaat yang merata sehingga berdampak menimbulkan kesenjangan pada golongan masyarakat atau wilayah tertentu secara tidak proposional. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Sayifullah dan Gandasari (2016) menyatakan bahwa IPM

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut peneliti tersebut bahwa nilai indeks yang tinggi pada seseorang belum tentu memberikan jaminan akan jauh dari kemiskinan. Misalnya saja jika dilihat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, belum dapat dipastikan bahwa mereka yang memiliki kualitas pendidikan yang baik akan hidup dengan layak dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Hal seperti inilah yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran dan akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan.

4.3.4 Analisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan

Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2021 yang artinya hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hipotesis sesuai dengan yang diduga, dimana Inflasi mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah. Inflasi secara umum dianggap sebagai masalah penting yang harus segera diselesaikan. Memerangi laju inflasi merupakan salah satu bentuk dari kebijakan ekonomi yang sering dikenal dengan kebijakan stabilitas harga. Dengan terkendalinya harga barang dan jasa yang beredar di masyarakat memungkinkan pemerintah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

1. Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.
2. PDRB Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif serta tidak signifikan pada tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi PDRB maka tingkat kemiskinan akan meningkat
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Inflasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif serta signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan angka inflasi akan menaikkan angka kemiskinan.

5.2. Implikasi

1. Adanya pengaruh positif dan signifikan dalam pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah maka pemerintah seharusnya menerapkan program pelatihan kerja atau keterampilan khusus bagi jenjang pendidikan tinggi. Dengan adanya pelatihan tersebut maka akan meningkatkan skill bagi pencari kerja. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penyuluhan dan pelatihan mengenai kewirausahaan terutama terhadap jenjang pendidikan tinggi sehingga masyarakat tidak hanya fokus mencari pekerjaan akan tetapi dapat berpeluang membuka lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang bertambah maka akan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran menjadi berkurang.
2. Adanya pengaruh positif dan tidak signifikan dalam PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah maka pemerintah harus mampu meningkatkan PDRB agar berkualitas. Pemerintah harus meningkatkan sektor-sektor yang berpotensi dalam menyerap tenaga kerja

seperti sektor industri, perdagangan, pertanian, dan sektor pariwisata. Adanya pertumbuhan dalam sektor tersebut maka akan meningkatkan pendapatan ekonomi serta lapangan pekerjaan menjadi bertambah sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak dan kemiskinan akan berkurang.

3. Adanya pengaruh positif dan signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah maka pemerintah perlu memperhatikan program sosial seperti pembekalan skill, layanan kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat menjadi dapat menjadi lebih produktif serta dapat meningkatkan nilai pendapatan mereka. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi serta angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah turun.
4. Adanya pengaruh positif dan signifikan variabel inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah maka pemerintah harus dapat mengendalikan dengan menggunakan kebijakan fiskal atau moneter. Salah satu contohnya menikkan insentif bagi pengusaha yang melaksanakan perdagangan internasional, mengeluarkan kebijakan ekspor-impor yang secara berkelanjutan bisa meminimalisir tingkatan inflasi, memperbaiki infrastruktur pembangunan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa tengah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, untuk mengembangkan penelitian dengan lebih baik lagi dengan menambahkan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Widodo, d. (2011). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, I, 25 - 42.
- Arellano, M., dan Bond, S. (1991). Some Test of Spesification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. *Review of Economic Studies*, 58, 277-97.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi.
- Amalia, F. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001- 2010*. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/629>, 158 - 167.
- Agustina D. Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *J Sainika Unpam J Sains dan Mat Unpam*. 2020;3(1):81.
doi:10.32493/jsmu.v3i1.5640
- Andhykha R, Handayani HR, Woyanti N. Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekon dan Manaj*. 2018;33(2):113-123.
doi:10.24856/mem.v33i2.671
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). *Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models*. *Journal of Econometrics* .
- Bintang ABM, Woyanti N. Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015). *Media Ekon dan Manaj*. 2018;33(1):20-28. doi:10.24856/mem.v33i1.563
- Chatami, Fatma Dayuning. 2014. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta

tahun 1991-2012”

Dermoredjo, P. S. (2003). *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 51)

Diah Retnowati, Harsuti. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal & Proceeding FEB Unsoed*. Published online 2017:608-618.

Ema Dian Ristika et al. 2020. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur.

Ferezegia D vita. Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan. *J Sos Hum Terap*. 2018;1(1):1-6.
<http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>

G., M. A. (2018). *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Gujarati, Damodar N, (2004). *Basic Econometrics*, Fourth edition, Singapore. McGraw-Hill Inc.

Hasibuan SL, Rujiman, Sukardi. Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. *J Penelit Pendidik Sos Hum*. 2020;5(2):139-141.

Handayani, A. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 – 2015*. Bojonegoro: Fakultas Ekonomi Bojonegoro.

Haughton, Jonathan dan Shahidur. (2010) *Handbook on Poverty and inequality*. New York: World Bank.

<http://repository.unpas.ac.id/45042/5/BAB%20II.pdf>. Diakses 19 September 2022.

<https://jatengprov.go.id>. Diakses 20 September 2022.

<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/8/kemiskinan.html> Diakses October 2, 2022, 11:28 am

- Indra. (2009). Analisis Hubungan Intensitas Energi dan Pendapatan Perkapita, Studi Komparatif di 10 Negara Asia Pasifik. Thesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Indah Purboningtyas, Indah Retnosari, Tian Guretno, Ari Dirgantara, Dwi Agustina, M al Haris (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan IPM terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.
- Karim, A. A. (2007). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khomsan, Ali. et al. 2015. Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Leonita L, Sari RK. Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT J Ekon Manaj dan Akunt.* 2019;3(2):1. doi:10.24269/iso.v3i2.252
- Le Goff, M., & Singh, R. J. (2014). Does trade reduce poverty? A view from Africa. *Journal of African Trade*, 1(1), 5-14.
- Nurkse, R. (2006). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford Basis Blackwell.
- N Nurwati (2008). *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, - journal.unpad.ac.id
- Putra, W. (2018). *Perekonomian Indonesia : penerapan beberapa teori ekonomi pembangunan di Indonesia* . Depok: Rajawali Pers.
- Prasad, B. C. (1998). The woes of economic reform: poverty and income inequality in Fiji. *International Journal of Social Economics*, 25(6/7/8), 1073-1094.
- Prasetyo, A. A. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007. Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Ridzky Giovanni. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap

- Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Econ Dev Anal J.* 2018;7(1):23-31. doi:10.15294/edaj.v7i1.21922
- Statistik, B. P. (2015). *Katalog BPS 2014 Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. BPS.
- Sen A (1999). *Evaluative Reason : Dev as Free Oxford Oxford Univ Press Introd Introd*.
Published online 1999.
- Suroto. 1992. *Strategi pembangunan dan Perencanaan kesempatan kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- S. Suliyanto dan S. MM. 2017, “Metode Penelitian Kuantitatif”.
- Saryana. (2020). *Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*.
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- Septajaya, Feby. 2014. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu” (Skripsi), Universitas Bengkulu.
- Supartoyo, Yesi Hendriani., Jen Tatum dan Recky H. E. Sendouw. 2013. *The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia* (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)
- Sayifullah dan Gandasari. (Oktober 2016). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten*. *Jurnal Untirta* Vol. 6, No. 2. ISSN : 20894473.
- Sukirno. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukirno. 2004. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Todaro, M.P. (2013). *Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga*.
- Teddy Christianto, 2013. Volume VII, No. 2, Desember 2013 ISSN : 1978 -3612.
Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau, VII(2)
- Wicaksana A. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan*

- Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
Https://MediumCom/. Published online 2016.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wahyudi D, Rejekingsih TW. Analisis kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro J Econ*. 2013;2(1):1-15.
- Widarjono, A. (2015). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. Ekonisia. Yogyakarta.
- Wijayanto, R. D. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005 - 2008*.
- Wahyu, K. (2013). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran*.
- Wardani, E. P. (2018). *Analisis Determinan Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2016 (Studi Kasus Di 35 Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Tahun	Kabupaten / Kota	KEM	PENGANGGURAN	PDRB	IPM	INF
2011	Kabupaten Cilacap	224530	10.82	47.21	66.64	5.27
2012	Kabupaten Cilacap	240025	7.29	47.83	67.21	6.87
2013	Kabupaten Cilacap	256615	6.68	48.34	68.02	8.37
2014	Kabupaten Cilacap	265714	5.65	49.47	68.78	8.19
2015	Kabupaten Cilacap	273828	8.01	52.14	69.49	2.63
2016	Kabupaten Cilacap	292525	8.01	54.51	69.98	2.77
2017	Kabupaten Cilacap	307041	6.3	55.65	70.52	4.41
2018	Kabupaten Cilacap	320106	7.49	57.05	71.12	3.21
2019	Kabupaten Cilacap	337572	7.24	58.37	71.73	2.19
2020	Kabupaten Cilacap	351735	9.1	46.43	71.87	1.71
2021	Kabupaten Cilacap	363367	9.97	46.82	72.16	0.82
2011	Kabupaten Banyumas	249807	6.61	15.59	64.73	3.4
2012	Kabupaten Banyumas	271800	5.11	16.34	65.72	4.73
2013	Kabupaten Banyumas	295742	5.45	17.31	66.80	8.5
2014	Kabupaten Banyumas	309106	5.37	18.12	67.25	7.09
2015	Kabupaten Banyumas	320585	6.37	19.05	67.77	2.52
2016	Kabupaten Banyumas	344514	6.37	20.02	68.60	2.42
2017	Kabupaten Banyumas	357748	4.62	21.11	68.90	3.91
2018	Kabupaten Banyumas	366442	4.15	22.28	69.56	2.98
2019	Kabupaten Banyumas	385140	4.17	23.61	69.98	2.28
2020	Kabupaten Banyumas	406250	6.00	22.07	69.95	0.32
2021	Kabupaten Banyumas	417086	6.05	22.73	70.42	1.15
2011	Kabupaten Purbalingga	230461	5.1	13.33	67.45	4.47

2012	Kabupaten Purbalingga	247508	5.02	13.95	68.06	4.09
2013	Kabupaten Purbalingga	265262	5.63	14.52	68.55	9.57
2014	Kabupaten Purbalingga	275022	5.13	15.07	69.25	9.08
2015	Kabupaten Purbalingga	283366	4.84	15.73	69.89	1.62
2016	Kabupaten Purbalingga	301862	4.84	16.33	70.49	2.39
2017	Kabupaten Purbalingga	313343	5.33	17.04	70.75	3.72
2018	Kabupaten Purbalingga	324735	6.02	17.79	71.30	3.01
2019	Kabupaten Purbalingga	355702	4.73	18.71	71.96	2.59
2020	Kabupaten Purbalingga	375199	6.1	17.26	71.98	0.2
2021	Kabupaten Purbalingga	384183	6.05	17.59	72.44	7.2
2011	Kabupaten Banjarnegara	192303	4.97	11.35	64.33	4.73
2012	Kabupaten Banjarnegara	205369	3.69	11.85	64.94	4.55
2013	Kabupaten Banjarnegara	221056	4.16	12.41	65.53	8.35
2014	Kabupaten Banjarnegara	229718	4.06	12.98	66.23	7.78
2015	Kabupaten Banjarnegara	236399	5.05	13.60	67.03	2.97
2016	Kabupaten Banjarnegara	252328	5.05	14.25	67.48	2.87
2017	Kabupaten Banjarnegara	264387	4.72	14.97	67.72	3.67
2018	Kabupaten Banjarnegara	278210	3.99	15.72	68.41	3.04
2019	Kabupaten Banjarnegara	301792	4.44	16.60	68.99	2.68
2020	Kabupaten Banjarnegara	318334	5.86	14.83	68.97	1.9
2021	Kabupaten Banjarnegara	328679	5.86	15.13	69.15	2.0
2011	Kabupaten Kebumen	234005	4.73	11.20	61.58	4.52
2012	Kabupaten Kebumen	250413	3.58	11.70	62.29	4.64
2013	Kabupaten Kebumen	267763	3.52	12.18	62.84	10.46
2014	Kabupaten Kebumen	277280	3.25	12.84	63.15	7.36

2015	Kabupaten Kebumen	292177	4.14	13.60	64.73	2.91
2016	Kabupaten Kebumen	313881	4.14	14.24	65.52	2.71
2017	Kabupaten Kebumen	325819	5.58	14.93	65.86	3.25
2018	Kabupaten Kebumen	342437	5.48	15.71	66.54	3.01
2019	Kabupaten Kebumen	362847	4.69	16.62	67.34	2.18
2020	Kabupaten Kebumen	380557	6.07	14.50	67.45	1.56
2021	Kabupaten Kebumen	390599	6.03	14.87	67.86	1.32
2011	Kabupaten Purworejo	235459	5.3	12.85	64.05	2.52
2012	Kabupaten Purworejo	254314	3.2	13.39	64.47	3.66
2013	Kabupaten Purworejo	273481	5.15	13.99	64.86	7.14
2014	Kabupaten Purworejo	284409	5.1	14.57	65.67	8.48
2015	Kabupaten Purworejo	294158	4.01	15.29	66.87	3.45
2016	Kabupaten Purworejo	313931	4.01	16.03	67.41	2.66
2017	Kabupaten Purworejo	325871	3.64	16.83	68.29	4.29
2018	Kabupaten Purworejo	335995	4.43	17.68	68.80	3.93
2019	Kabupaten Purworejo	345458	2.91	18.68	69.60	5.2
2020	Kabupaten Purworejo	364289	4.04	17.09	69.81	4.29
2021	Kabupaten Purworejo	376127	3.59	17.56	70.05	0.25
2011	Kabupaten Wonosobo	226827	4.92	12.47	69.11	2.66
2012	Kabupaten Wonosobo	242047	5.21	12.99	69.40	3.84
2013	Kabupaten Wonosobo	258522	5.82	13.43	69.77	8.82
2014	Kabupaten Wonosobo	267548	5.34	14.00	70.12	8.44
2015	Kabupaten Wonosobo	275180	4.47	14.58	70.37	2.71
2016	Kabupaten Wonosobo	297422	4.47	15.29	70.66	2.97
2017	Kabupaten Wonosobo	308553	4.18	15.86	71.31	3.21

2018	Kabupaten Wonosobo	323490	3.5	16.59	71.87	3.52
2019	Kabupaten Wonosobo	340827	3.43	17.53	72.50	2.28
2020	Kabupaten Wonosobo	362683	5.37	15.47	72.68	5.41
2021	Kabupaten Wonosobo	373474	5.26	15.86	72.98	4.32
2011	Kabupaten Magelang	204430	6.83	12.80	63.07	2.64
2012	Kabupaten Magelang	218950	4.38	13.29	64.18	2.59
2013	Kabupaten Magelang	235430	6.13	13.93	64.57	8.34
2014	Kabupaten Magelang	246292	7.45	14.54	65.20	7.91
2015	Kabupaten Magelang	253866	5.16	15.15	65.70	3.6
2016	Kabupaten Magelang	271800	5.16	15.82	66.19	2.86
2017	Kabupaten Magelang	281237	2.44	16.54	66.89	3.47
2018	Kabupaten Magelang	296327	2.89	17.26	67.81	2.66
2019	Kabupaten Magelang	325921	3.07	18.10	68.27	2.12
2020	Kabupaten Magelang	342430	4.27	17.61	68.22	4.33
2021	Kabupaten Magelang	353608	5.03	18.12	68.43	5.11
2011	Kabupaten Boyolali	223755	5.81	15.54	64.16	3.35
2012	Kabupaten Boyolali	235399	4.43	16.26	64.75	3.45
2013	Kabupaten Boyolali	247845	5.44	17.09	65.86	8.21
2014	Kabupaten Boyolali	255391	4.95	17.90	66.35	7.45
2015	Kabupaten Boyolali	263734	2.03	18.86	67.13	2.58
2016	Kabupaten Boyolali	283921	2.03	19.75	67.85	2.65
2017	Kabupaten Boyolali	293405	3.67	20.78	68.39	3.08
2018	Kabupaten Boyolali	304575	2.18	21.85	69.11	2.19
2019	Kabupaten Boyolali	332996	3.09	23.14	69.87	2.75
2020	Kabupaten Boyolali	347520	5.28	21.13	69.87	4.45

2021	Kabupaten Boyolali	361922	5.09	21.91	70.12	4.11
2011	Kabupaten Klaten	275002	7.63	15.88	69.14	1.67
2012	Kabupaten Klaten	296530	3.7	16.70	69.51	3.65
2013	Kabupaten Klaten	315566	5.34	17.62	69.81	7.92
2014	Kabupaten Klaten	327231	4.75	18.56	70.34	7.76
2015	Kabupaten Klaten	340484	2.51	19.47	71.74	2.57
2016	Kabupaten Klaten	364240	2.51	20.40	72.18	2.31
2017	Kabupaten Klaten	376305	4.35	21.41	72.64	3.12
2018	Kabupaten Klaten	397447	3.14	22.50	73.22	2.39
2019	Kabupaten Klaten	405537	3.54	23.78	73.80	4.9
2020	Kabupaten Klaten	419510	5.46	21.84	74.25	5.67
2021	Kabupaten Klaten	436896	5.48	22.51	74.40	4.88
2011	Kabupaten Sukoharjo	240711	6.27	20.77	71.16	2.63
2012	Kabupaten Sukoharjo	259184	6.1	21.79	71.71	4.22
2013	Kabupaten Sukoharjo	279400	5.98	22.84	72.42	8.42
2014	Kabupaten Sukoharjo	291949	4.6	23.87	73.19	7.93
2015	Kabupaten Sukoharjo	303030	4.52	25.01	73.81	2.69
2016	Kabupaten Sukoharjo	327217	4.52	26.22	73.97	2.34
2017	Kabupaten Sukoharjo	337037	2.27	27.51	74.25	3.4
2018	Kabupaten Sukoharjo	345363	2.72	28.88	74.79	2.31
2019	Kabupaten Sukoharjo	377319	3.39	30.51	75.29	5.92
2020	Kabupaten Sukoharjo	393776	6.93	29.37	75.56	3.11
2021	Kabupaten Sukoharjo	410273	3.32	30.31	76.12	4.23
2011	Kabupaten Wonogiri	207496	3.82	14.75	72.34	3.0
2012	Kabupaten Wonogiri	221019	3.46	15.56	72.81	3.43

2013	Kabupaten Wonogiri	235728	3.61	16.24	73.22	8.6
2014	Kabupaten Wonogiri	244761	3.45	17.03	73.76	7.2
2015	Kabupaten Wonogiri	252903	3.07	17.89	74.53	2.13
2016	Kabupaten Wonogiri	275507	3.07	18.77	75.06	2.94
2017	Kabupaten Wonogiri	284710	2.38	19.71	75.56	2.32
2018	Kabupaten Wonogiri	293357	2.28	20.73	76.07	2.63
2019	Kabupaten Wonogiri	327364	2.55	21.85	76.84	3.23
2020	Kabupaten Wonogiri	341643	4.27	19.75	76.98	4.11
2021	Kabupaten Wonogiri	356728	2.43	20.25	77.13	3.94
2011	Kabupaten Karanganyar	236093	5.78	20.89	64.75	3.31
2012	Kabupaten Karanganyar	255072	5.82	21.90	65.75	3.29
2013	Kabupaten Karanganyar	275865	3.84	22.92	66.40	8.7
2014	Kabupaten Karanganyar	288814	3.54	23.89	66.77	7.38
2015	Kabupaten Karanganyar	303056	3.6	24.86	67.76	2.4
2016	Kabupaten Karanganyar	329531	3.6	25.97	68.23	1.93
2017	Kabupaten Karanganyar	340538	3.17	27.23	68.66	3.15
2018	Kabupaten Karanganyar	348896	2.28	28.61	69.37	2.48
2019	Kabupaten Karanganyar	365151	3.12	30.14	69.98	2.28
2020	Kabupaten Karanganyar	385563	5.96	28.07	70.25	2.56
2021	Kabupaten Karanganyar	401542	5.89	28.80	70.49	3.11
2011	Kabupaten Sragen	222267	8.43	19.53	71.00	2.86
2012	Kabupaten Sragen	234254	5.88	20.62	72.26	3.74
2013	Kabupaten Sragen	247495	5.63	21.91	73.33	7.55
2014	Kabupaten Sragen	255550	6.04	23.04	73.89	8.51
2015	Kabupaten Sragen	263199	4.51	24.33	74.26	3.05

2016	Kabupaten Sragen	283649	4.51	25.65	74.90	2.49
2017	Kabupaten Sragen	292544	4.55	27.09	75.22	3.18
2018	Kabupaten Sragen	312106	4.83	28.56	75.54	2.49
2019	Kabupaten Sragen	335334	3.32	30.30	75.89	2.44
2020	Kabupaten Sragen	348890	4.75	27.05	75.86	1.79
2021	Kabupaten Sragen	363349	4.76	27.81	75.99	1.46
2011	Kabupaten Grobogan	242212	5.33	9.98	68.12	1.86
2012	Kabupaten Grobogan	260435	4.2	10.42	68.91	4.48
2013	Kabupaten Grobogan	278786	6.1	10.83	69.95	7.88
2014	Kabupaten Grobogan	290827	4.25	11.21	70.52	8.03
2015	Kabupaten Grobogan	303455	5.22	11.81	71.10	3.31
2016	Kabupaten Grobogan	333009	5.22	12.28	71.43	2.41
2017	Kabupaten Grobogan	345379	3.02	12.94	72.40	4.05
2018	Kabupaten Grobogan	366192	2.22	13.63	72.96	2.89
2019	Kabupaten Grobogan	375521	3.54	14.36	73.43	2.82
2020	Kabupaten Grobogan	395001	4.5	13.36	73.95	1.24
2021	Kabupaten Grobogan	404456	4.38	13.77	74.08	1.98
2011	Kabupaten Blora	206016	6.9	12.68	65.41	2.26
2012	Kabupaten Blora	221088	4.75	13.23	66.39	3.55
2013	Kabupaten Blora	237850	6.23	13.87	67.43	7.94
2014	Kabupaten Blora	248903	4.3	14.41	67.77	7.13
2015	Kabupaten Blora	257581	4.68	15.12	68.05	2.85
2016	Kabupaten Blora	279972	4.68	18.60	68.52	2.14
2017	Kabupaten Blora	291114	2.85	19.64	68.87	2.98
2018	Kabupaten Blora	308520	3.3	20.42	69.32	2.78

2019	Kabupaten Blora	335837	3.82	21.28	69.86	2.62
2020	Kabupaten Blora	353259	4.89	19.78	69.87	1.37
2021	Kabupaten Blora	363649	3.81	20.46	70.41	1.39
2011	Kabupaten Rembang	240859	7.22	14.73	63.88	2.73
2012	Kabupaten Rembang	261156	5.75	15.37	64.70	4.28
2013	Kabupaten Rembang	284160	5.97	16.06	65.37	6.88
2014	Kabupaten Rembang	299503	5.23	16.75	65.84	7.59
2015	Kabupaten Rembang	314596	4.51	17.52	66.22	2.66
2016	Kabupaten Rembang	338986	4.51	18.30	66.61	1.75
2017	Kabupaten Rembang	354440	3.19	19.43	67.52	3.31
2018	Kabupaten Rembang	365443	2.83	20.42	67.95	2.53
2019	Kabupaten Rembang	384561	3.6	21.43	68.65	2.46
2020	Kabupaten Rembang	403932	4.83	20.80	68.84	3.11
2021	Kabupaten Rembang	414977	3.67	21.50	69.37	2.52
2011	Kabupaten Pati	264372	11.17	16.55	65.36	2.3
2012	Kabupaten Pati	288271	11.98	17.42	66.03	3.92
2013	Kabupaten Pati	314609	7.29	18.33	66.84	7.57
2014	Kabupaten Pati	332228	6.37	19.06	67.40	8.01
2015	Kabupaten Pati	347575	4.43	20.09	68.18	3.23
2016	Kabupaten Pati	377442	4.43	21.07	68.60	2.31
2017	Kabupaten Pati	393817	3.83	22.15	68.95	3.51
2018	Kabupaten Pati	414316	3.57	23.29	69.46	2.77
2019	Kabupaten Pati	423922	3.64	24.64	70.15	2.51
2020	Kabupaten Pati	445913	4.74	23.09	70.02	3.5
2021	Kabupaten Pati	458616	4.6	23.71	70.43	2.43

2011	Kabupaten Kudus	256745	8.32	69.85	65.71	3.34
2012	Kabupaten Kudus	276317	5.89	71.76	66.13	4.77
2013	Kabupaten Kudus	299097	8.07	73.92	66.47	8.31
2014	Kabupaten Kudus	314211	5.03	76.24	66.99	8.59
2015	Kabupaten Kudus	328404	5.04	78.23	68.51	3.28
2016	Kabupaten Kudus	356951	5.04	79.24	69.03	2.32
2017	Kabupaten Kudus	373224	3.56	80.83	70.12	4.17
2018	Kabupaten Kudus	393078	3.28	82.48	70.71	3.11
2019	Kabupaten Kudus	406470	3.8	84.46	71.35	3.02
2020	Kabupaten Kudus	429666	3.8	83.66	71.77	1.03
2021	Kabupaten Kudus	450992	3.77	81.60	72.28	1.65
2011	Kabupaten Jepara	242963	5.48	12.53	69.89	3.59
2012	Kabupaten Jepara	263266	4.29	13.05	70.57	4.52
2013	Kabupaten Jepara	285287	6.34	13.55	71.58	7.95
2014	Kabupaten Jepara	299914	5.09	13.99	72.00	9.87
2015	Kabupaten Jepara	314422	3.12	14.48	72.72	4.57
2016	Kabupaten Jepara	341754	3.12	14.99	72.94	3.45
2017	Kabupaten Jepara	355607	4.84	15.58	73.84	2.83
2018	Kabupaten Jepara	371296	3.75	16.26	74.58	4.2
2019	Kabupaten Jepara	386693	2.92	17.08	74.94	3.32
2020	Kabupaten Jepara	407056	6.7	17.71	75.00	1.92
2021	Kabupaten Jepara	419028	4.23	18.46	75.16	0.17
2011	Kabupaten Demak	254441	5.03	11.47	67.63	3.49
2012	Kabupaten Demak	276041	8.4	11.85	68.45	4.1
2013	Kabupaten Demak	299773	7.08	12.33	69.11	8.22

2014	Kabupaten Demak	315570	5.17	12.73	69.61	8.69
2015	Kabupaten Demak	328529	6.02	13.34	70.02	2.8
2016	Kabupaten Demak	356919	6.02	13.88	70.25	2.27
2017	Kabupaten Demak	371525	4.47	14.54	70.79	3.57
2018	Kabupaten Demak	402211	7.03	15.18	71.38	2.73
2019	Kabupaten Demak	411202	5.42	15.91	71.88	2.85
2020	Kabupaten Demak	432533	7.31	15.30	71.99	1.85
2021	Kabupaten Demak	445176	5.28	15.55	72.36	1.93
2011	Kabupaten Semarang	227471	6.16	24.21	66.84	3.29
2012	Kabupaten Semarang	244762	4.87	25.31	67.55	4.56
2013	Kabupaten Semarang	263352	3.9	26.44	68.38	8.11
2014	Kabupaten Semarang	275612	3.9	27.61	68.95	8.63
2015	Kabupaten Semarang	286918	2.57	28.74	69.75	2.85
2016	Kabupaten Semarang	307505	2.57	29.87	70.10	2.39
2017	Kabupaten Semarang	317935	1.78	31.15	70.41	3.67
2018	Kabupaten Semarang	341576	2.25	32.50	71.26	2.8
2019	Kabupaten Semarang	377674	2.54	33.97	71.87	2.93
2020	Kabupaten Semarang	404455	4.57	33.00	72.22	2.93
2021	Kabupaten Semarang	416395	5.02	33.92	72.57	1.19
2011	Kabupaten Temanggung	198888	3.54	14.36	70.35	2.42
2012	Kabupaten Temanggung	212487	3.39	14.82	70.88	4.73
2013	Kabupaten Temanggung	229548	4.87	15.44	71.29	7.01
2014	Kabupaten Temanggung	240845	3.19	16.06	71.65	7.81
2015	Kabupaten Temanggung	248866	1.5	16.75	71.89	2.74
2016	Kabupaten Temanggung	268730	1.5	17.43	72.40	2.42

2017	Kabupaten Temanggung	277707	2.97	18.15	73.20	3.12
2018	Kabupaten Temanggung	287981	3.23	18.92	73.61	2.89
2019	Kabupaten Temanggung	310176	2.98	19.80	74.14	2.66
2020	Kabupaten Temanggung	323705	3.85	18.88	74.10	1.56
2021	Kabupaten Temanggung	336034	2.62	19.37	74.24	1.7
2011	Kabupaten Kendal	234475	6.54	22.00	64.14	3.49
2012	Kabupaten Kendal	253276	6.31	22.94	64.91	3.89
2013	Kabupaten Kendal	275016	6.43	24.15	65.52	6.9
2014	Kabupaten Kendal	289486	6.15	25.18	65.97	8.34
2015	Kabupaten Kendal	301449	7.07	26.28	67.07	4.13
2016	Kabupaten Kendal	323078	7.07	27.52	67.60	2.47
2017	Kabupaten Kendal	335497	4.93	28.89	68.34	3.6
2018	Kabupaten Kendal	353127	6.02	30.33	68.83	2.16
2019	Kabupaten Kendal	369769	6.26	31.99	69.56	2.58
2020	Kabupaten Kendal	396691	7.56	29.96	69.57	2.58
2021	Kabupaten Kendal	407387	7.55	30.86	69.88	1.19
2011	Kabupaten Batang	184592	6.66	14.01	66.96	3.01
2012	Kabupaten Batang	195983	5.88	14.51	67.55	3.83
2013	Kabupaten Batang	208671	7.02	15.22	67.98	8.08
2014	Kabupaten Batang	216952	7.42	15.88	68.46	7.66
2015	Kabupaten Batang	224437	4.56	16.59	69.57	2.94
2016	Kabupaten Batang	240541	4.56	17.27	70.11	2.24
2017	Kabupaten Batang	249292	5.82	18.08	70.62	3.44
2018	Kabupaten Batang	256549	4.2	18.95	71.28	2.36
2019	Kabupaten Batang	286116	4.11	19.91	71.97	2.47

2020	Kabupaten Batang	309202	6.92	18.79	72.29	1.86
2021	Kabupaten Batang	318330	6.59	19.53	72.50	1.93
2011	Kabupaten Pekalongan	249958	6.91	12.79	62.59	2.65
2012	Kabupaten Pekalongan	270026	5.08	13.29	63.09	2.96
2013	Kabupaten Pekalongan	293039	4.78	13.98	63.60	8.18
2014	Kabupaten Pekalongan	306281	6.03	14.56	64.07	8.32
2015	Kabupaten Pekalongan	317796	5.1	15.14	65.46	3.42
2016	Kabupaten Pekalongan	341648	5.1	15.82	66.38	2.96
2017	Kabupaten Pekalongan	354435	4.39	16.56	67.35	4.01
2018	Kabupaten Pekalongan	361297	4.36	17.41	67.86	2.83
2019	Kabupaten Pekalongan	382832	4.35	18.31	68.42	2.36
2020	Kabupaten Pekalongan	403662	6.97	16.61	68.65	1.53
2021	Kabupaten Pekalongan	416779	4.28	17.01	68.92	1.53
2011	Kabupaten Pemalang	235316	7.37	9.33	64.72	2.8
2012	Kabupaten Pemalang	251986	4.85	9.79	65.33	4.04
2013	Kabupaten Pemalang	271861	6.48	10.29	66.26	6.52
2014	Kabupaten Pemalang	287358	7.44	10.82	66.98	7.38
2015	Kabupaten Pemalang	298622	6.53	11.39	67.40	3.52
2016	Kabupaten Pemalang	319434	6.53	11.97	67.71	2.33
2017	Kabupaten Pemalang	331584	5.59	12.60	68.40	3.64
2018	Kabupaten Pemalang	351183	6.17	13.28	68.97	2.95
2019	Kabupaten Pemalang	372115	6.45	14.09	69.71	2.71
2020	Kabupaten Pemalang	389209	7.64	12.37	69.63	2.71
2021	Kabupaten Pemalang	401857	6.71	12.75	70.11	2.74
2011	Kabupaten Tegal	222700	10.59	11.45	59.66	2.74

2012	Kabupaten Tegal	239207	6.12	12.00	60.78	4.13
2013	Kabupaten Tegal	258366	6.89	12.76	61.81	7.79
2014	Kabupaten Tegal	271875	8.47	13.35	62.35	8.48
2015	Kabupaten Tegal	282861	9.52	14.04	63.70	3.64
2016	Kabupaten Tegal	308270	9.52	14.82	64.17	2.67
2017	Kabupaten Tegal	319758	7.33	15.57	65.04	3.58
2018	Kabupaten Tegal	332298	8.24	16.39	65.67	2.95
2019	Kabupaten Tegal	365334	8.12	17.34	66.32	2.51
2020	Kabupaten Tegal	390520	9.82	15.37	66.32	2.71
2021	Kabupaten Tegal	404655	9.97	15.79	66.56	2.71
2011	Kabupaten Brebes	261160	11.08	12.31	61.97	3.09
2012	Kabupaten Brebes	281601	8.22	12.80	62.67	4.61
2013	Kabupaten Brebes	307238	9.61	13.49	63.50	9.83
2014	Kabupaten Brebes	327452	9.53	14.14	64.10	6.2
2015	Kabupaten Brebes	340538	6.49	14.92	65.04	3.08
2016	Kabupaten Brebes	364059	6.49	15.61	65.84	2.84
2017	Kabupaten Brebes	382125	8.04	16.43	66.44	4.24
2018	Kabupaten Brebes	405932	7.2	17.23	67.33	3.09
2019	Kabupaten Brebes	414642	7.39	18.25	68.24	2.28
2020	Kabupaten Brebes	431897	9.83	16.56	68.39	3.85
2021	Kabupaten Brebes	445853	9.78	16.79	68.79	1.59
2011	Kota Magelang	280877	11.51	35.76	60.51	4.15
2012	Kota Magelang	313250	8.99	37.55	60.92	4.15
2013	Kota Magelang	350554	6.75	39.67	61.87	7.79
2014	Kota Magelang	376143	7.38	41.45	62.55	7.92

2015	Kota Magelang	405228	6.43	43.44	63.18	2.7
2016	Kota Magelang	425191	6.43	45.59	63.98	2.25
2017	Kota Magelang	450908	6.68	47.92	64.86	3.9
2018	Kota Magelang	476582	4.78	50.37	65.68	2.65
2019	Kota Magelang	481282	4.37	53.23	66.12	2.19
2020	Kota Magelang	522099	8.59	51.94	66.11	2.19
2021	Kota Magelang	537783	8.73	53.56	66.32	1.93
2011	Kota Surakarta	326233	7.7	45.44	74.47	1.93
2012	Kota Surakarta	361517	6.29	47.73	75.00	2.87
2013	Kota Surakarta	403121	7.22	50.48	75.29	8.32
2014	Kota Surakarta	417807	6.16	52.90	75.79	8.01
2015	Kota Surakarta	406840	4.53	55.55	76.39	2.56
2016	Kota Surakarta	430293	4.53	58.30	77.16	2.15
2017	Kota Surakarta	448062	4.47	61.39	77.84	3.1
2018	Kota Surakarta	464063	4.35	64.70	78.31	2.45
2019	Kota Surakarta	473516	4.16	68.55	78.80	2.94
2020	Kota Surakarta	487445	7.92	66.65	78.99	1.38
2021	Kota Surakarta	511216	7.85	69.27	79.43	1.3
2011	Kota Salatiga	254726	9.02	35.93	78.00	2.84
2012	Kota Salatiga	277039	6.84	37.36	78.44	4.12
2013	Kota Salatiga	302884	6.21	39.11	78.89	7.67
2014	Kota Salatiga	320204	4.46	40.69	79.34	7.84
2015	Kota Salatiga	337511	6.43	42.21	80.14	2.61
2016	Kota Salatiga	345146	6.43	43.82	80.76	2.19
2017	Kota Salatiga	359944	3.96	45.65	80.85	3.5

2018	Kota Salatiga	380856	4.23	47.65	81.46	2.47
2019	Kota Salatiga	418955	4.33	50.03	81.86	0.27
2020	Kota Salatiga	454154	7.44	49.51	82.21	1.5
2021	Kota Salatiga	480903	7.26	50.74	82.62	3.87
2011	Kota Semarang	272996	7.65	54.23	78.76	2.87
2012	Kota Semarang	297848	6.01	56.47	79.10	0.41
2013	Kota Semarang	328271	6.02	58.98	79.37	8.19
2014	Kota Semarang	348824	7.76	61.63	79.98	8.53
2015	Kota Semarang	368477	5.77	64.14	80.96	2.56
2016	Kota Semarang	382160	5.77	66.82	81.14	2.32
2017	Kota Semarang	402297	6.61	70.14	81.68	3.64
2018	Kota Semarang	427511	5.21	73.49	82.41	2.76
2019	Kota Semarang	474930	4.5	77.62	83.12	2.93
2020	Kota Semarang	522691	9.57	83.26	83.14	0.05
2021	Kota Semarang	543929	9.54	87.36	83.60	1.19
2011	Kota Pekalongan	270663	8.06	17.12	77.58	2.45
2012	Kota Pekalongan	294586	7.67	17.89	78.04	3.55
2013	Kota Pekalongan	322313	5.28	18.76	78.68	7.4
2014	Kota Pekalongan	338398	5.42	19.59	79.24	7.82
2015	Kota Pekalongan	352717	4.1	20.39	80.23	3.46
2016	Kota Pekalongan	375600	4.1	21.28	81.19	2.94
2017	Kota Pekalongan	390555	5.05	22.22	82.01	3.61
2018	Kota Pekalongan	415172	6.08	23.28	82.72	2.92
2019	Kota Pekalongan	425026	5.8	24.48	83.19	2.76
2020	Kota Pekalongan	460789	7.02	23.92	83.05	1.19

2021	Kota Pekalongan	480415	6.89	24.66	83.55	1.19
2011	Kota Tegal	280349	9.77	30.42	69.54	2.58
2012	Kota Tegal	305818	8.75	31.52	69.95	0.4
2013	Kota Tegal	333553	9.32	33.15	70.82	5.8
2014	Kota Tegal	353301	9.2	34.66	71.53	7.4
2015	Kota Tegal	371528	8.06	36.38	72.69	3.95
2016	Kota Tegal	395631	8.06	38.21	73.32	2.71
2017	Kota Tegal	418845	8.19	40.34	73.77	4.03
2018	Kota Tegal	455488	7.81	42.55	74.24	3.08
2019	Kota Tegal	465047	8.08	45.07	74.77	2.56
2020	Kota Tegal	502031	8.4	40.08	74.98	2.56
2021	Kota Tegal	523413	8.25	40.94	75.40	1.03